



## **Modal Sosial Pemuda Putus Sekolah dalam Komunitas Desa Kabupaten Malaka**

**Stofiani Susana Lima<sup>1</sup>, Abdul Syukur<sup>2</sup>, Nirwaning Makleat<sup>3</sup>, Reschi Vanchristo Ardi Sinlae<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa  
Cendana, Kupang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>stofiani.susana.lima@staf.undana.ac.id

### **Abstrak**

Putus sekolah sering dipahami sebagai indikator marginalisasi sosial yang membatasi peluang pemuda dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Namun, pengalaman di berbagai komunitas lokal menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemuda tanpa ijazah tetap mempertahankan integrasi sosial melalui jaringan komunitas dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 pemuda tanpa ijazah di tiga desa serta focus group discussion dengan pemerintah desa, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda tanpa ijazah tetap terlibat aktif dalam kehidupan komunitas melalui partisipasi dalam kegiatan adat, keagamaan, dan kerja kolektif. Aktivitas ekonomi informal serta jaringan keluarga berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial yang memungkinkan pemuda memperoleh pengakuan dalam komunitas. Meskipun ketiadaan kredensial pendidikan formal membatasi akses terhadap pekerjaan institusional, komunitas lokal menyediakan mekanisme alternatif integrasi sosial melalui modal sosial dan kontribusi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman pemuda tanpa ijazah tidak dapat dipahami semata melalui perspektif defisit, tetapi perlu dilihat sebagai proses adaptasi sosial yang dimediasi oleh jaringan komunitas dan mekanisme pengakuan sosial.

**Kata Kunci:** Putus Sekolah, Modal Sosial, Pengakuan Sosial, Transisi Pemuda, Komunitas Pedesaan.

### **Abstract**

*School dropout is often understood as an indicator of social marginalization that limits young people's opportunities in economic and social life. However, experiences in many local communities reveal a more complex reality. This study aims to examine how youth without educational credentials maintain social integration through community networks and economic activities in Malaka Regency, East Nusa Tenggara. The research employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with fifteen youth without diplomas in three villages, as well as focus group discussions with village officials, managers of Community Learning Centers (PKBM), and parents. The findings indicate that youth without diplomas remain actively involved in community life through participation in customary, religious, and collective activities. Informal economic activities and family networks function as sources of social legitimacy that enable these youth to gain recognition within the community. Although the absence of formal educational credentials limits access to institutional employment, local communities provide alternative mechanisms of social integration through social capital and economic contribution. These findings suggest that the experiences of youth without diplomas cannot be understood solely through a deficit perspective. Instead, they should be viewed as a process of social adaptation mediated by community networks and mechanisms of social recognition.*

**Keywords:** School Dropout, Social Capital, Social Recognition, Youth Transitions, Rural Communities.

## PENDAHULUAN

Partisipasi pendidikan sering dipandang sebagai jalur penting mobilitas sosial dan pengembangan kapasitas individu. Melalui pendidikan formal, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kredensial yang membuka akses pada peluang ekonomi dan sosial. Dalam perspektif *human capital*, pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan produktivitas dan mobilitas sosial (Merriman, 2017). Namun, hubungan antara kredensial pendidikan dan integrasi sosial tidak selalu linear. Keputusan pendidikan dipengaruhi kondisi rumah tangga dan kemiskinan serta interaksi faktor individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan (Contreras-Villalobos et al., 2023; Jordan et al., 2022).

Dalam kajian pendidikan dan transformasi sosial, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kompetensi yang meningkatkan kemampuan lulusan untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja dan perubahan sosial-ekonomi (Jiang et al., 2022). Namun dalam praktiknya, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang memiliki keterbatasan kesempatan kerja formal, pengembangan kapasitas pemuda tidak selalu sepenuhnya bertumpu pada jalur pendidikan formal. Pengalaman kerja, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, serta proses pembelajaran nonformal sering kali menjadi sumber penting bagi pengembangan keterampilan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sosial pemuda dapat terbentuk melalui berbagai jalur alternatif yang tidak selalu bergantung pada sistem pendidikan formal. Salah satu perspektif yang dapat menjelaskan dinamika tersebut adalah konsep *social capital*. Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma timbal balik, serta kepercayaan yang memungkinkan individu memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya sosial dan ekonomi (Field, 2017)

Dalam konteks komunitas lokal, jaringan sosial sering berperan membuka peluang kerja, menyediakan dukungan sosial, serta mendorong partisipasi dalam aktivitas kolektif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa modal sosial dapat berperan sebagai mediator yang signifikan dalam meningkatkan employability sekaligus memperluas partisipasi sosial pemuda (Contreras-Villalobos et al., 2023; Jordan et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, program pendidikan kesetaraan seperti Paket C yang diselenggarakan melalui PKBM juga menjadi jalur alternatif bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal untuk tetap mengembangkan kapasitas dan partisipasi sosial di tingkat komunitas (Katayama, 2023). Dalam konteks pedesaan, praktik kerja kolektif, hubungan kekerabatan, serta solidaritas komunitas sering kali menjadi sumber legitimasi sosial yang memungkinkan individu tetap memperoleh pengakuan sosial meskipun tidak memiliki kredensial pendidikan formal. Pengalaman pendidikan nonformal berbasis komunitas juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran di PKBM dapat memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi kolektif serta pembelajaran berbasis kebutuhan lokal (Hayat et al., 2024; Lukman, 2021).

Selain dimensi relasional tersebut, proses integrasi sosial juga berkaitan dengan dimensi normatif dan simbolik yang dibahas dalam teori *recognition*. (Schmitz, 2018) berpendapat bahwa identitas dan harga diri individu berkembang melalui pengalaman memperoleh pengakuan dalam relasi sosial, baik pada tingkat interpersonal, hukum, maupun solidaritas sosial. Pengakuan ini membuat individu merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas, sehingga mendorong keterlibatan dan partisipasi sosial. Kesenjangan pengakuan (*recognition gaps*) dapat memperkuat ketimpangan sosial, terutama ketika kelompok tertentu dipandang kurang bernilai atau distigmatisasi dalam struktur sosial yang ada. Sistem evaluasi institusional sering menjadikan kredensial akademik sebagai indikator utama kompetensi dan nilai sosial seseorang. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, pengakuan sosial tidak hanya berasal dari institusi formal. Kontribusi terhadap aktivitas kolektif, produktivitas ekonomi, serta keterlibatan dalam kehidupan komunitas juga dapat menjadi dasar bagi terbentuknya pengakuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dapat didistribusikan melalui berbagai *evaluative regimes* yang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem pendidikan formal (Renner, 2021). Sejalan dengan itu, penelitian lain menunjukkan bahwa sistem pengakuan yang lebih inklusif berpotensi mengurangi ketimpangan pendidikan sekaligus memperluas peluang partisipasi sosial (Abreu & Kenny, 2022).

Dalam konteks komunitas pedesaan, mekanisme pengakuan sosial tidak selalu ditentukan oleh indikator formal seperti kredensial pendidikan, tetapi juga oleh berbagai praktik evaluasi sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Konsep *evaluative regimes* menjelaskan bagaimana komunitas membangun standar penilaian tertentu untuk menilai kontribusi dan nilai sosial individu. Dalam banyak komunitas lokal, partisipasi dalam kegiatan adat, kontribusi ekonomi bagi keluarga, serta keterlibatan dalam kerja kolektif dapat menjadi dasar bagi terbentuknya pengakuan sosial. Dalam perspektif teori rekognisi yang dikembangkan oleh Axel Honneth, identitas dan harga diri individu berkembang melalui pengalaman memperoleh pengakuan dalam relasi sosial yang mencakup dimensi interpersonal, hukum, dan solidaritas sosial (Schmitz, 2018). Oleh karena itu, kerangka rekognisi menjadi penting untuk

memahami bagaimana pemuda tanpa ijazah tetap memperoleh legitimasi sosial melalui kontribusi terhadap kehidupan komunitas, meskipun mereka tidak memiliki pengakuan formal dari sistem pendidikan atau pasar kerja. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual mengenai bagaimana berbagai mekanisme pengakuan sosial bekerja dalam komunitas pedesaan seperti di Kabupaten Malaka.

Kerangka analitis tersebut menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan literatur mengenai *youth transition*. Kajian tentang transisi pemuda menunjukkan bahwa proses menuju kedewasaan semakin bersifat beragam dan tidak selalu mengikuti jalur linear dari pendidikan menuju pekerjaan stabil (Cuervo & Wyn, 2022). Proses transisi ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, struktur peluang lokal, serta norma sosial yang membentuk berbagai kemungkinan jalur menuju kemandirian. (Farrugia, 2023) menunjukkan bahwa dalam banyak komunitas, pekerjaan informal, mobilitas ekonomi, serta kontribusi terhadap kehidupan sosial sering menjadi indikator penting kedewasaan sosial. Perspektif ini menantang asumsi modernisasi yang menempatkan pendidikan formal sebagai satu-satunya jalur menuju produktivitas dan integrasi sosial. Sebaliknya, proses transisi menuju kedewasaan dapat berlangsung melalui kombinasi pengalaman kerja, mobilitas ekonomi, serta keterlibatan dalam aktivitas komunitas (Wynhoff Olsen & Johansson, 2022).

Dalam konteks tersebut, pemuda yang tidak menyelesaikan pendidikan formal sering kali mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk mempertahankan partisipasi sosial dan memperoleh pengakuan dalam komunitasnya. Mereka tetap terlibat dalam jaringan kerja kolektif, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas ekonomi lokal yang memberikan legitimasi sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa *disengagement* dari pendidikan formal tidak selalu berarti terputus dari kehidupan sosial. Sebaliknya, pemuda tanpa ijazah dapat membangun bentuk integrasi sosial melalui kontribusi ekonomi dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas. Kondisi ini sekaligus menantang perspektif defisit yang selama ini cukup dominan dalam studi tentang putus sekolah, yang sering menempatkan pemuda tanpa ijazah sebagai kelompok yang secara sosial terpinggirkan (Allen et al., 2021).

Meskipun penelitian tentang putus sekolah sering menyoroti dampak negatif seperti marginalisasi sosial, pengangguran, dan keterbatasan mobilitas ekonomi, sebagian besar kajian masih didominasi pendekatan defisit yang memandang pemuda tanpa ijazah sebagai kelompok rentan eksklusi sosial. Namun, sedikit studi yang menelaah bagaimana mereka membangun integrasi sosial melalui jaringan komunitas lokal serta memperoleh pengakuan sosial dalam praktik evaluasi kehidupan desa, khususnya di pedesaan Nusa Tenggara Timur.

Literatur terbaru mengenai *youth transition* di negara berkembang menunjukkan bahwa jalur menuju kedewasaan semakin beragam dan tidak selalu mengikuti pola linear dari pendidikan menuju pekerjaan formal. Banyak pemuda membangun strategi kehidupan melalui pekerjaan informal, mobilitas ruang, serta jaringan keluarga dan komunitas lokal (Cooper, 2023). Di wilayah pedesaan, keterbatasan peluang kerja formal mendorong pemuda mengembangkan strategi nafkah yang fleksibel melalui kombinasi aktivitas ekonomi lokal dan jaringan sosial komunitas (Arslan et al., 2021; Griffin et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial pemuda tanpa ijazah serta mekanisme pengakuan sosial yang memungkinkan mereka tetap berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. Penelitian ini menyoroti peran modal sosial, kontribusi ekonomi, serta keterlibatan komunitas dalam membentuk legitimasi sosial di luar kredensial pendidikan formal. Dengan memahami dinamika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan perspektif yang lebih komprehensif mengenai fenomena putus sekolah dan transisi pemuda, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara pendidikan, pengakuan sosial, dan integrasi komunitas.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan faktor-faktor yang memengaruhi fenomena anak putus sekolah. Penelitian dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Malaka, yaitu Desa Lorotulus (Kecamatan Wewiku), Desa Kletek (Kecamatan Malaka Timur), dan Desa Umatoos (Kecamatan Malaka Tengah).

Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah 15 anak putus sekolah yang diwawancarai secara mendalam, dengan komposisi lima orang dari setiap desa. Karakteristik informan meliputi usia, pendidikan terakhir, durasi putus sekolah, serta aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Ringkasan profil informan disajikan pada Tabel 1 untuk memberikan gambaran konteks sosial para partisipan penelitian. Selain itu, penelitian juga melibatkan informan dalam

kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang terdiri atas kepala desa atau perwakilan pemerintah desa setempat, pengelola PKBM, serta orang tua anak putus sekolah dengan jumlah sembilan orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, FGD, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pengalaman, faktor penyebab, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan putus sekolah. Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk pedoman wawancara dan panduan FGD yang disusun berdasarkan kerangka konseptual penelitian.

Analisis data dilakukan melalui proses coding tematik secara bertahap yang meliputi *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Pada tahap *open coding*, peneliti mengidentifikasi unit-unit makna penting dari transkrip wawancara, hasil FGD, dan catatan observasi lapangan. Selanjutnya, melalui *axial coding*, kode-kode yang memiliki keterkaitan konseptual dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas, seperti partisipasi komunitas, aktivitas ekonomi, dan pengalaman pendidikan nonformal. Tahap *selective coding* kemudian digunakan untuk mensintesis kategori-kategori tersebut menjadi tema-tema utama yang menjelaskan dinamika sosial pemuda putus sekolah dalam komunitas. Proses analisis dilakukan secara manual melalui pembacaan berulang terhadap seluruh data penelitian untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari pengalaman para informan. Tema-tema yang dihasilkan dari proses analisis ini kemudian menjadi dasar penyusunan sintesis temuan yang disajikan pada tabel analisis di bagian hasil penelitian.

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Temuan awal yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan anak putus sekolah terlebih dahulu dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul dari pengalaman mereka. Isu-isu tersebut kemudian dikonfrontasi dengan hasil FGD yang melibatkan kepala desa atau perwakilan pemerintah desa, pengelola PKBM, serta orang tua anak putus sekolah untuk memperoleh perspektif komunitas mengenai fenomena yang sama. Selain itu, peneliti juga membandingkan temuan wawancara dan FGD dengan hasil observasi lapangan terkait aktivitas sehari-hari para informan, seperti keterlibatan dalam kegiatan ekonomi lokal, aktivitas sosial, serta interaksi mereka di lingkungan komunitas. Proses perbandingan antar sumber data ini memungkinkan peneliti memverifikasi konsistensi informasi, mengidentifikasi perbedaan perspektif, serta memperkuat interpretasi terhadap dinamika sosial yang memengaruhi pengalaman pemuda putus sekolah di tingkat komunitas.

**Tabel 1.** Profil Informan Penelitian

Informan	Usia	Pendidikan Terakhir	Durasi Putus Sekolah (tahun)	Aktivitas Saat Ini
TL	21	SMA	±3	Pengangguran
AF	17	SMP	±1–2	Membantu kakak menanam sayur
JO	23	SMA kelas 2	±6–7	Bertani dan jual bensin eceran
SE	18	SMP kelas 3	±2–3	Pemain bola kaki dan bertani
EB	19	SD kelas 6	±6–7	Berjualan di pasar
YL	17	SMP	±1–2	Membantu orang tua berkebun
RG	18	SD kelas 6	±5–6	Membantu orangtua berkebun
AL	19	SMP kelas 3	±3–4	Anggota aktif Karang Taruna
EN	21	SMP kelas 2	±5–6	Bertani dan berjualan
RE	20	SMP kelas 2	±4–5	Pengangguran/warga belajar PKBM
AN	18	SMA kelas 2	±1–2	Pengangguran
AT	21	SMP kelas 2	±5–6	Menenun kain
MR	21	SMP kelas 2	±5–6	Pembina seni bela diri karate & bertani
MK	17	SMP kelas 2	±1–2	Bertani
AG	18	SD	±6–7	Bertani

**Catatan:** Inisial digunakan untuk melindungi identitas informan. Wawancara dilakukan pada tahun 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa informan penelitian berasal dari berbagai latar belakang pendidikan terakhir dengan mayoritas berhenti pada jenjang SMP. Durasi putus sekolah bervariasi antara sekitar satu hingga tujuh tahun, dan sebagian besar informan saat ini terlibat dalam aktivitas ekonomi informal seperti pertanian, pekerjaan domestik, serta usaha kecil di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Integrasi Sosial Berbasis Partisipasi Komunitas

Pemuda tanpa ijazah di Kabupaten Malaka tetap menunjukkan tingkat integrasi sosial yang relatif kuat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas. Observasi lapangan menunjukkan bahwa berbagai aktivitas kolektif seperti kegiatan adat, aktivitas keagamaan, kerja bakti, serta pertemuan komunitas menjadi ruang utama interaksi sosial pemuda. Dalam konteks tersebut, tidak ditemukan segregasi sosial yang jelas berdasarkan status pendidikan. Pemuda tanpa ijazah berinteraksi secara terbuka dengan anggota masyarakat lain dan berpartisipasi dalam aktivitas komunitas tanpa mengalami pembatasan sosial yang berarti.

Hasil FGD menguatkan temuan ini. Orang tua, tokoh masyarakat, serta aparat desa menyatakan bahwa pemuda yang tidak menyelesaikan pendidikan formal tetap dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial seperti karang taruna, organisasi gereja, maupun kerja bakti desa. Dalam praktik sosial lokal, partisipasi dalam aktivitas kolektif lebih dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap kehidupan komunitas daripada sebagai fungsi dari status pendidikan formal.

Wawancara dengan informan juga menunjukkan bahwa pemuda tanpa ijazah memaknai keterlibatan sosial tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di komunitas. Salah satu informan menyatakan:

“Saya bergaul seperti biasa... kami ikut kegiatan agama, adat, dan sosial.”(A, 17 tahun)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas kolektif menjadi mekanisme utama yang memungkinkan pemuda tanpa ijazah mempertahankan posisi sosial mereka dalam komunitas.

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa pemuda yang aktif dalam kegiatan komunitas sering memperoleh pengakuan informal dari masyarakat, misalnya melalui kepercayaan untuk membantu penyelenggaraan kegiatan adat atau keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi sosial pemuda tanpa ijazah lebih banyak dibangun melalui praktik partisipasi komunitas dibandingkan melalui legitimasi berbasis kredensial pendidikan formal.

Realitas yang muncul dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam konteks komunitas pedesaan, partisipasi dalam aktivitas kolektif dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial yang penting bagi individu. Dalam perspektif modal sosial (Field, 2017), pengakuan sosial tidak selalu bergantung pada kredensial pendidikan formal, tetapi juga pada kontribusi nyata dalam kehidupan komunitas melalui jaringan relasi, kepercayaan, dan norma timbal balik yang membentuk integrasi sosial.

#### Aktivitas Ekonomi Sebagai Pengakuan Sosial

Selain partisipasi komunitas, aktivitas ekonomi juga menjadi sumber penting legitimasi sosial bagi pemuda tanpa ijazah. Observasi menunjukkan bahwa banyak pemuda bekerja di sektor pertanian keluarga, perdagangan kecil, jasa informal, maupun pekerjaan migran. Dalam konteks sosial lokal, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi sering dipandang sebagai indikator tanggung jawab dan kedewasaan sosial.

FGD menunjukkan bahwa keluarga dan masyarakat menilai kontribusi ekonomi pemuda sebagai bentuk partisipasi yang bernilai dalam kehidupan rumah tangga. Pemuda yang mampu menghasilkan pendapatan, meskipun dalam skala terbatas, sering memperoleh penghargaan sosial yang lebih besar dalam lingkungan keluarga.

Salah satu informan menyatakan: “Kalau saya punya penghasilan, orang lebih mendengar pendapat saya.” (J, 23 tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperoleh pengakuan sosial dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Data observasi mendukung temuan ini. Pemuda yang memiliki penghasilan, terutama dari pekerjaan migran atau usaha kecil, sering dilibatkan dalam diskusi keluarga maupun pengambilan keputusan sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga.

Migrasi kerja juga muncul sebagai strategi ekonomi yang cukup umum. Beberapa pemuda bekerja sebagai tenaga kerja migran dan kembali dengan membawa tabungan yang digunakan untuk membangun rumah atau memulai usaha kecil. Observasi menunjukkan bahwa pengalaman migrasi sering meningkatkan rasa percaya diri serta memperkuat posisi sosial pemuda dalam komunitas, meskipun tidak selalu menghasilkan mobilitas ekonomi jangka panjang.

Dari temuan ini terlihat bahwa kontribusi ekonomi dapat menjadi sumber penting bagi pembentukan pengakuan sosial di tingkat keluarga dan komunitas. Dalam kerangka teori recognition, kontribusi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi komunitas dapat menjadi dasar terbentuknya penghargaan sosial yang memperkuat identitas dan harga diri individu (Schmitz, 2018). Dengan demikian, aktivitas ekonomi informal tidak hanya berfungsi sebagai strategi nafkah, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang memungkinkan pemuda memperoleh legitimasi sosial dalam lingkungan komunitasnya.

### **Diferensiasi Partisipasi dalam Ruang Formal dan Informal**

Meskipun pemuda tanpa ijazah relatif terintegrasi dalam kehidupan komunitas, pola partisipasi mereka menunjukkan diferensiasi antara ruang sosial informal dan ruang formal institusional. Dalam ruang informal seperti kegiatan karang taruna, aktivitas adat, atau kegiatan keagamaan, pemuda menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif aktif. Mereka terlibat dalam diskusi, membantu penyelenggaraan kegiatan, serta berinteraksi secara terbuka dengan anggota masyarakat lain.

Sebaliknya, dalam ruang formal seperti rapat desa atau forum administratif, sebagian pemuda cenderung menunjukkan sikap lebih pasif. Observasi rapat desa menunjukkan bahwa pemuda sering memilih duduk di bagian belakang dan jarang menyampaikan pendapat secara langsung.

Salah satu informan menyatakan: “Kalau rapat resmi saya lebih baik dengar saja.” (*R, 18 tahun*)

Hasil FGD menunjukkan bahwa sikap tersebut tidak selalu mencerminkan penolakan sosial, melainkan lebih berkaitan dengan rasa kurang percaya diri ketika berada dalam forum formal yang dianggap lebih evaluatif. Banyak pemuda merasa belum memiliki pengalaman atau kapasitas komunikasi yang cukup untuk berbicara dalam forum institusional.

Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda tanpa ijazah bersifat kontekstual. Mereka cenderung lebih aktif dalam ruang sosial yang berbasis relasi komunitas dan pengalaman kolektif, sementara partisipasi dalam ruang formal sering dipengaruhi oleh persepsi mengenai kompetensi dan legitimasi sosial.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ambivalensi dalam proses pengakuan sosial yang dialami pemuda tanpa ijazah. Di satu sisi mereka memperoleh pengakuan dalam ruang sosial komunitas yang berbasis solidaritas dan pengalaman kolektif, namun di sisi lain pengakuan tersebut tidak selalu dapat dikonversi menjadi legitimasi dalam ruang institusional yang lebih formal. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep *evaluative regimes* (Renner, 2021; Abreu & Kenny, 2022), berbagai sistem sosial memiliki standar penilaian yang berbeda dalam menentukan nilai sosial individu. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan mekanisme evaluasi sosial antara komunitas lokal dan institusi formal.

### **Pendidikan Nonformal sebagai Jalur Mobilitas Alternatif**

Pendidikan nonformal muncul sebagai salah satu jalur alternatif yang memungkinkan pemuda tanpa ijazah memperoleh kredensial administratif sekaligus mengembangkan keterampilan praktis. Observasi lapangan menunjukkan bahwa program pendidikan kesetaraan seperti Paket C di PKBM Ina Malaka, PKBM Lurumutin dan PKBM Wanibesak menjadi salah satu mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh ijazah setara SMA.

Dalam salah satu kasus, kepala desa yang sebelumnya putus sekolah mengikuti program Paket C untuk memenuhi syarat administratif dalam proses pencalonan kepala desa. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan dapat berfungsi sebagai jalur mobilitas administratif dalam struktur pemerintahan lokal.

Hasil FGD juga menunjukkan bahwa pemuda memiliki minat terhadap pendidikan nonformal, terutama ketika program tersebut dikaitkan dengan pengembangan keterampilan praktis. Pelatihan seperti pembuatan mebel, keterampilan teknis, maupun kewirausahaan dipandang lebih relevan dengan kebutuhan kerja lokal dibandingkan dengan pendidikan akademik yang bersifat lebih abstrak.

Dalam konteks ini, pendidikan nonformal tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh ijazah, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran alternatif yang dapat menjembatani kebutuhan pengembangan kapasitas individu dengan tuntutan ekonomi lokal.

Temuan lapangan tersebut menguatkan pandangan bahwa pendidikan nonformal dapat berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman sosial pemuda di tingkat komunitas dengan kebutuhan legitimasi administratif dalam sistem institusional yang lebih formal. Dengan menyediakan jalur alternatif untuk memperoleh kredensial pendidikan sekaligus keterampilan praktis, lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM berpotensi memperluas peluang mobilitas sosial bagi pemuda tanpa ijazah (Katayama, 2023; Lukman, 2021).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa dinamika pemuda tanpa ijazah di Kabupaten Malaka terbentuk melalui kombinasi partisipasi komunitas, kontribusi ekonomi, serta akses terhadap jalur pendidikan nonformal. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi sosial dan peluang mobilitas tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan kredensial pendidikan, tetapi juga oleh jaringan sosial, pengalaman kerja, serta mekanisme pengakuan yang berkembang dalam komunitas lokal.

Berdasarkan proses coding tematik terhadap data wawancara, FGD, dan observasi lapangan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tema utama yang menggambarkan dinamika sosial pemuda tanpa ijazah di Kabupaten Malaka. Sintesis temuan tersebut disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Analisis Dinamika Sosial Pemuda Tanpa Ijazah di Kabupaten Malaka

<b>Tema</b>	<b>Analisis Temuan</b>	<b>Implikasi Sosial</b>
Integrasi Sosial Komunitas	Partisipasi dalam kegiatan adat, keagamaan, dan kerja kolektif berfungsi sebagai mekanisme utama legitimasi sosial pemuda tanpa ijazah. Pengakuan diperoleh melalui keterlibatan dalam aktivitas komunitas, bukan melalui status pendidikan formal.	Program pemberdayaan pemuda dapat memanfaatkan jaringan komunitas sebagai basis penguatan partisipasi sosial.
Legitimasi Ekonomi Alternatif	Aktivitas ekonomi informal menjadi sumber pengakuan sosial yang penting. Kontribusi ekonomi terhadap keluarga memperkuat posisi pemuda dalam relasi sosial lokal.	Kebijakan pemuda perlu memperhatikan penguatan keterampilan kerja dan akses ekonomi, tidak hanya peningkatan kredensial pendidikan.
Diferensiasi Ruang Sosial	Partisipasi pemuda menunjukkan perbedaan antara ruang informal yang berbasis relasi komunitas dan ruang formal yang berbasis evaluasi institusional. Hal ini memengaruhi tingkat kepercayaan diri pemuda dalam forum formal.	Program pengembangan kapasitas komunikasi dan kepemimpinan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam ruang institusional.
Pendidikan Nonformal	Pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan menjadi jalur alternatif untuk memperoleh kredensial administratif sekaligus meningkatkan kapasitas kerja.	Penguatan lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM dapat memperluas peluang mobilitas bagi pemuda tanpa ijazah.
Modal Sosial Komunitas	Jaringan kepercayaan, kerja sama, dan praktik timbal balik dalam komunitas berfungsi sebagai sumber daya sosial yang menopang integrasi pemuda tanpa ijazah.	Intervensi kebijakan perlu memperkuat jaringan sosial lokal sebagai basis pembangunan kapasitas pemuda.

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemuda tanpa ijazah di Kabupaten Malaka tidak sepenuhnya berada dalam kondisi eksklusi sosial. Meskipun tidak memiliki kredensial pendidikan formal, mereka tetap terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi melalui pekerjaan informal, jaringan sosial lokal, serta kegiatan kolektif di tingkat komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pencapaian pendidikan formal dan integrasi sosial tidak selalu berjalan secara linear. Dalam perspektif teori human capital, pendidikan dipahami sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas individu sekaligus membuka peluang mobilitas sosial (Merriman, 2017). Namun, pengalaman pemuda di Malaka memperlihatkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan formal tidak sepenuhnya menghilangkan kapasitas mereka untuk membangun peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Melalui pengalaman kerja, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, serta proses pembelajaran informal, pemuda tanpa ijazah tetap mengembangkan kapasitas adaptif untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pengembangan kapasitas individu tidak selalu sepenuhnya bergantung pada institusi pendidikan formal, terutama dalam konteks sosial yang memiliki keterbatasan akses pendidikan dan pasar kerja formal (Contreras-Villalobos et al., 2023).

Dalam dinamika tersebut, jaringan sosial komunitas memainkan peran penting dalam menopang partisipasi sosial dan ekonomi pemuda. Perspektif modal sosial menjelaskan bahwa relasi sosial, kepercayaan, serta praktik kerja sama dalam komunitas dapat berfungsi sebagai sumber daya yang membantu individu memperoleh akses terhadap peluang ekonomi dan dukungan sosial (Field, 2017). Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi keluarga, kerja kolektif dalam komunitas, serta praktik timbal balik menjadi mekanisme penting yang memungkinkan pemuda tanpa ijazah tetap terintegrasi dalam kehidupan sosial lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa modal sosial dapat memediasi employability dan membuka peluang ekonomi, khususnya dalam konteks yang memiliki keterbatasan akses

terhadap pekerjaan formal (Jordan et al., 2022). Dalam situasi tersebut, jaringan komunitas tidak hanya menyediakan dukungan material, tetapi juga menghasilkan legitimasi sosial melalui kontribusi individu terhadap aktivitas kolektif masyarakat (Toyon, 2024). Temuan ini juga mendukung studi mengenai pendidikan berbasis komunitas yang menunjukkan bahwa solidaritas sosial dan jaringan kepercayaan dapat menjadi sumber penting bagi pengembangan kapasitas pemuda di wilayah pedesaan (Anwar & Shawmi, 2023; Hayat et al., 2024).

Meskipun demikian, ketiadaan ijazah formal tetap membentuk batas tertentu dalam akses terhadap pengakuan institusional dan peluang mobilitas ekonomi yang lebih luas. Dalam kerangka teori recognition, pengakuan sosial merupakan elemen penting dalam pembentukan identitas dan harga diri individu (Schmitz, 2018). Dalam banyak masyarakat modern, kredensial pendidikan berfungsi sebagai simbol legitimasi yang menentukan akses terhadap pekerjaan formal dan status sosial. Akibatnya, pemuda tanpa ijazah sering berada dalam posisi yang ambivalen: di satu sisi mereka memperoleh pengakuan melalui kontribusi dalam kehidupan komunitas, tetapi di sisi lain menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pengakuan dari institusi formal seperti sistem pendidikan dan pasar kerja. Perspektif boundary processes membantu menjelaskan dinamika ini dengan menunjukkan bahwa kategori sosial tertentu, termasuk kepemilikan ijazah, berfungsi sebagai penanda simbolik yang membedakan akses terhadap peluang dan status sosial. Dalam konteks tersebut, perbedaan mekanisme evaluasi sosial antara berbagai sistem sosial menghasilkan distribusi pengakuan yang tidak selalu seimbang, sebagaimana ditunjukkan dalam studi mengenai evaluative regimes dalam sistem pendidikan (Abreu & Kenny, 2022; Renner, 2021).

Dalam konteks komunitas pedesaan, kontribusi terhadap kehidupan kolektif seperti keterlibatan dalam kerja adat, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, serta kontribusi ekonomi keluarga sering menjadi indikator utama nilai sosial individu. Namun dalam sistem institusional yang lebih luas, terutama dalam pasar kerja formal dan struktur administrasi pemerintahan, evaluasi kompetensi lebih banyak didasarkan pada kredensial pendidikan sebagai bentuk standar legitimasi formal (Abreu & Kenny, 2022; Renner, 2021). Perbedaan standar penilaian ini menyebabkan pengakuan sosial yang diperoleh pemuda dalam komunitas tidak selalu dapat dikonversi menjadi mobilitas vertikal dalam struktur institusional. Dengan demikian, meskipun pemuda tanpa ijazah dapat memperoleh legitimasi sosial di tingkat lokal melalui kontribusi sosial dan ekonomi, keterbatasan akses terhadap kredensial pendidikan tetap membatasi kemampuan mereka untuk mengakses posisi formal yang mensyaratkan legitimasi administratif (Renner, 2021).

Dinamika ini juga dapat dipahami melalui literatur mengenai transisi pemuda yang menekankan bahwa jalur menuju kedewasaan semakin beragam dan tidak selalu mengikuti pola linear melalui pendidikan formal. Penelitian tentang youth transitions menunjukkan bahwa pengalaman pemuda kini semakin ditandai oleh keberagaman jalur menuju kemandirian yang melibatkan kombinasi pengalaman kerja, mobilitas ekonomi, serta keterlibatan sosial dalam komunitas (Cuervo & Wyn, 2022; Farrugia, 2023). Dalam konteks Malaka, pemuda tanpa ijazah membangun jalur transisi alternatif melalui pekerjaan informal, kontribusi terhadap ekonomi keluarga, dan partisipasi dalam aktivitas komunitas. Pola ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengalaman putus sekolah tidak selalu identik dengan marginalisasi sosial, melainkan dapat menghasilkan strategi kehidupan yang fleksibel dalam menghadapi keterbatasan struktural (Allen et al., 2021; Fitri et al., 2023). Namun demikian, jalur transisi yang bertumpu pada jaringan sosial lokal juga memiliki keterbatasan tertentu dalam membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas, karena akses terhadap sektor ekonomi formal masih sangat dipengaruhi oleh kepemilikan kredensial pendidikan (Katayama, 2023; Wynhoff Olsen & Johansson, 2022). Dengan demikian, dinamika pemuda tanpa ijazah di Malaka menunjukkan adanya ketegangan antara integrasi sosial yang kuat di tingkat komunitas dan keterbatasan mobilitas struktural dalam sistem ekonomi dan pendidikan yang lebih luas.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa pengalaman pemuda tanpa ijazah tidak selalu identik dengan eksklusi sosial. Dalam konteks komunitas pedesaan di Nusa Tenggara Timur, integrasi sosial dapat terbentuk melalui mekanisme alternatif seperti partisipasi komunitas, kontribusi ekonomi informal, dan jaringan kekerabatan. Temuan ini memperluas perspektif mengenai putus sekolah dengan menyoroti peran modal sosial komunitas sebagai sumber legitimasi sosial yang dapat mengimbangi keterbatasan kredensial pendidikan formal (Lukman, 2021; Ramdhan, 2024; Taufik et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda tanpa ijazah di Kabupaten Malaka tidak sepenuhnya berada dalam kondisi eksklusi sosial sebagaimana sering diasumsikan dalam literatur mengenai putus sekolah. Meskipun tidak memiliki kredensial pendidikan formal, mereka tetap mempertahankan integrasi sosial melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas komunitas, seperti kegiatan adat, keagamaan, dan kerja

kolektif di tingkat desa. Partisipasi dalam ruang sosial tersebut memungkinkan pemuda membangun relasi sosial yang kuat serta memperoleh pengakuan dari masyarakat. Selain itu, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi informal juga berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial yang memperkuat posisi mereka dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Kontribusi ekonomi, meskipun berskala terbatas, sering dipandang sebagai indikator tanggung jawab dan kedewasaan sosial.

Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya diferensiasi partisipasi antara ruang sosial informal dan ruang institusional. Pemuda tanpa ijazah cenderung lebih aktif dalam aktivitas komunitas yang berbasis relasi sosial, sementara partisipasi dalam forum formal masih relatif terbatas. Dalam konteks ini, pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan menjadi jalur penting yang dapat memperluas peluang mobilitas serta memperkuat kapasitas pemuda. Oleh karena itu, penguatan program pemberdayaan berbasis komunitas dan pendidikan nonformal menjadi strategi yang relevan untuk mendukung pengembangan kapasitas pemuda di wilayah pedesaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pemuda dan masyarakat di Kabupaten Malaka yang telah bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman selama proses penelitian. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah desa, pengelola PKBM, orang tua anak putus sekolah serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran pengumpulan data di lapangan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pendidikan dan pemberdayaan pemuda di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, M., & Kenny, M. (2022). Recognition, dignity and educational inequality. *Journal of Social Policy*, 51(4), 789–805. <https://doi.org/10.1017/S0047279421000678>
- Allen, K.-A., Kern, M. L., Vella-Brodick, D., & Hattie, J. (2021). What Schools Need to Know About Fostering School Belonging. *Educational Psychology Review*. <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09607-9>
- Anwar, S., & Shawmi, A. N. (2023). Community-based education model to empower communities in utilizing local potential. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.24042/00202314362300>
- Arslan, A., Tschirley, D., Di Nucci, C., & Winters, P. (2021). Youth inclusion in rural transformation. *Journal of Development Studies*, 57(4), 537–543. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1808197>
- Contreras-Villalobos, T., López, V., Baleriola, E., & González, L. (2023). Dropout in youth and adult education: A multilevel analysis of students and schools in Chile. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1163088>
- Cooper, A. (2023). Morphing between the margins: How youth make a living across multiple spaces in South Africa and beyond. *Journal of Youth Studies*. <https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2246919>
- Cuervo, H., & Wyn, J. (2022). Youth transitions in rural and regional contexts. *Journal of Youth Studies*, 25(5), 623–639. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1910812>
- Farrugia, D. (2023). Youth, work and social participation. *Journal of Youth Studies*, 26, 233–248. <https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2039160>
- Field, J. (2017). *Social Capital* (3rd ed.). Routledge.
- Fitri, E. S., Khotmi, N., & Kahar, A. S. J. (2023). Determinants of accessing adolescent health services among school dropout adolescents in Lombok. *International Journal of Health and Social Behavior*, 1(4). <https://doi.org/10.62951/ijhsb.v1i4.193>
- Griffin, C., Sirimorok, N., & Dressler, W. H. (2023). The persistence of precarity: Youth livelihood struggles and aspirations in the context of truncated agrarian change in South Sulawesi, Indonesia. *Agriculture and Human Values*. <https://doi.org/10.1007/s10460-023-10489-5>
- Hayat, A., Ul-Jannah, Z. N., Eristi, D., & Talib, C. A. (2024). The service of community learning centers in organizing nonformal education for village community development. *Journal of Nonformal Education*. <https://doi.org/10.15294/jone.v12i1.37021>
- Jiang, L., Chen, Z., & Lei, C. (2022). Current college graduates' employability factors based on university graduates in Shaanxi Province, China. *Frontiers in Psychology*, 13, 1042243. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1042243>
- Jordan, L. P., Zhou, X., Fang, L., Wu, Q., & Ren, Q. (2022). Remaining in school in rural China: Social capital and academic self-efficacy. *Youth*, 2(2), 138–149. <https://doi.org/10.3390/youth2020011>

- Katayama, N. (2023). New developments and roles of community learning centers in Indonesia: Focusing on equivalency education. *Journal of International Development Studies*, 32(1), 131–151. [https://doi.org/10.32204/jids.32.1\\_131](https://doi.org/10.32204/jids.32.1_131)
- Lukman, A. I. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i2.43669>
- Merriman, K. K. (2017). *Valuation of Human Capital: Quantifying the Importance of an Assembled Workforce*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-58934-3>
- Nopy, Y. (2024). Realizing independent learning through the role of PKBM. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*. <https://doi.org/10.22460/empowerment.v14i2.6022>
- Ramdhan, M. (2024). PKBM's contribution to improving the quality of non-formal education in Cianjur. *Jurnal ASIK*, 3(2). <https://doi.org/10.59639/asik.v3i2.99>
- Renner, H. M. (2021). *Recognition and legitimacy in community participation*.
- Schmitz, V. (2018). *Axel Honneth and the Critical Theory of Recognition*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-91980-5>
- Taufik, A., Nursalam, N., & Akib, E. (2024). Evaluation of the effectiveness of PKBM program Package C in improving student competence. *PPSDP International Journal of Education*, 4(2). <https://doi.org/10.59175/pijed.v4i2.840>
- Toyon, M. A. S. (2024). Effect of university social capital on working students' dropout intentions: Insights from Estonia. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/ejihpe14080160>
- Wynhoff Olsen, T., & Johansson, J. (2022). Youth transitions in peripheral rural regions. *Journal of Youth Studies*, 25(7), 913–929. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1945634>